

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 10 Juli 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Detik.com	Kamis, 9 Juli 2020	Pemerintah Cuma Sanguap Bangun 870 Ribu Unit Rumah Dalam 5 Tahun	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi membeberkan alasan pemerintah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program Tapera dianggap sebagai solusi untuk mengurangi masalah backlog atau defisit perumahan yang selama ini jadi PR besar bagi pemerintah RI. https://finance.detik.com/properti/d-5086229/pemerintah-cuma-sanguap-bangun-870-ribu-unit-rumah-dalam-5-tahun?_ga=2.170576105.834122669.1594000762-1745634070.1586912911
2	Antaranews.com	Kamis, 9 Juli 2020	Kementerian PUPR: 1.823 hunian di Bogor bakal divedah rumah	Kementerian PUPR menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.823 rumah tidak layak huni untuk masyarakat di Bogor, Jawa Barat. https://www.antaranews.com/berita/1601674/kementeria-n-pupr-1823-hunian-di-bogor-bakal-divedah-rumah
3	Antaranews.com	Kamis, 9 Juli 2020	BP Tapera proyeksikan himpun dana Rp60 triliun pada 2024	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memproyeksikan dapat menghimpun dan mengelola dana sebesar Rp 60 triliun pada 2024. https://www.antaranews.com/berita/1600990/bp-tapera-proyeksikan-himpun-dana-rp60-triliun-pada-2024
4	Antaranews.com	Kamis, 9 Juli 2020	PUPR: Tapera merupakan inovasi dukung program sejuta rumah	Kementerian PUPR menyampaikan bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan inovasi untuk mendukung program sejuta rumah. https://www.antaranews.com/berita/1600774/pupr-tapera-merupakan-inovasi-dukung-program-sejuta-rumah
5	Timesindonesia.com	Kamis, 9 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Program Sejuta Rumah akan Didukung Tapera	Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI, Khalawi Abdul Hamid target pembangunan 5 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk periode 2020-2024 akan dibantu pendanaannya dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). https://www.timesindonesia.co.id/read/news/282511/kementeria-n-pupr-ri-program-sejuta-rumah-akan-didukung-tapera
6	Timesindonesia.com	Kamis, 9 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Tol Pekanbaru–Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri Riau	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru–Dumai sepanjang 131,48 km dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas–Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara–Dumai. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/282489/kementeria-n-pupr-ri-tol-pekanbarudumai-tingkatkan-konektivitas-kawasan-industri-riau
7	Timesindonesia.com	Kamis, 9 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat akan Terhubung ke KSPN Danau Toba	Di samping meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata dengan melakukan preservasi dan pelebaran jalan lingkar Pulau Samosir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat sepanjang 143,5 km untuk meningkatkan konektivitas serta untuk mempermudah akses dari Medan ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/282460/kem

				enterian-pupr-ri--tol-kuala-tanjungtebing-tinggiparapat-akan-terhubung-ke-kspn-danau-toba
8	Beritasatu.com	Kamis, 9 Juli 2020	Bedah Rumah di Kota Bogor, Kempupera Alokasikan Rp 25,9 Miliar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.823 rumah di Bogor, Jawa Barat. https://www.beritasatu.com/ekonomi/653889/bedah-rumah-di-kota-bogor-kempupera-alokasikan-rp-259-miliar
9	Tribunnews.com	Kamis, 9 Juli 2020	Tidak Semua Renovasi Stadion Piala Dunia U-20 Dikerjakan Kementerian PUPR	Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PPSPPOP) Ditjen Cipta Karya, Iwan Suprijanto menegaskan bahwa timnya hanya menangani beberapa Stadion dari Enam Stadion yang telah ditunjuk sebagai host Piala Dunia U-20 2021. https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/09/tidak-semua-renovasi-stadion-piala-dunia-u-20-dikerjakan-kementerian-pupr
10	Kumparan.com	Kamis, 9 Juli 2020	Antisipasi Kekeringan, Kementerian PUPR Tinjau Irigasi di Indramayu, Jabar	Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, melakukan kunjungan lapangan untuk memantau saluran irigasi dan memastikan air sampai ke lahan persawahan petani di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Kamis (09/07/2020). https://kumparan.com/ciremaityday/antisipasi-kekeringan-kementerian-pupr-tinjau-irigasi-di-indramayu-jabar-1tlqGbZWhKk
11	Republika.co.id	Jumat, 10 Juli 2020	Kementerian PUPR Bantu Bedah Rumah Tak Layak Huni	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.823 rumah tidak layak huni untuk masyarakat di Bogor, Jawa Barat. https://republika.co.id/berita/qd7lwc380/kementerian-pupr-bantu-bedah-rumah-tak-layak-huni
12	Kompas, halaman 10	Jumat, 10 Juli 2020	Infrastruktur Tarik Investasi	Infrastruktur, kendati tak secara langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan investor sebelum menempati investasi. Infrastruktur juga jadi poin yang diperhitungkan dalam daya saing suatu negara.
13	Bisnis Indonesia, halaman 7	Jumat, 10 Juli 2020	Tapera Sokong Program Sejuta Rumah	Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan jumlah rumah (backlog) mencapai Rp552,7 triliun.
14	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 1	Jumat, 10 Juli 2020	Proyek Trans Sumatera Ditargetkan Tembus 500 kilometer	Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ditargetkan bisa menembus lebih dari 500 kilometer hingga akhir tahun ini. Senior Executive Vice President Corporate Secretary, PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, mengatakan terdapat 495 kilometer yang akan dinyatakan selesai terbangun dalam beberapa pekan ke depan.
15	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 3	Jumat, 10 Juli 2020	Hutama Karya Cari Pembiayaan Alternatif Jalan Tol Sumatera	PT. Hutama Karya (Persero) Tbk berupaya memperbanyak skema pembiayaan alternatif pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk mengurangi ketergantungan terhadap kas pemerintah. Senior Executive Vice President Corporate Secretary, PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan proyek sepanjang total 2.878 kilometer itu sebagian besar merupakan proyek penugasan yang membutuhkan sokongan penyertaan modal negara (PMN).
16	Media Indonesia, halaman 9	Jumat, 10 Juli 2020	Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan di Tengah Pandemi	Dengan datang mendadak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuat para pekerja proyek pembangunan Jembatan Sei Alalak, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sempat terperangah.

Judul	Infrastruktur Tarik Investasi	Tanggal	Jumat, 10 Juli 2020
Media	Kompas, halaman 10		
Resume	Infrastruktur, kendati tak secara langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan investor sebelum menempati investasi. Infrastruktur juga jadi poin yang diperhitungkan dalam daya saing suatu negara.		

Infrastruktur Tarik Investasi

Investor datang ke kawasan industri di Jawa Tengah. Mereka tertarik berinvestasi di daerah yang menawarkan keunggulan, antara lain akses infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS — Infrastruktur, kendati tak secara langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan investor sebelum menempatkan investasi.

Infrastruktur juga jadi poin yang diperhitungkan dalam daya saing suatu negara.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam laporan Daya Saing 2019 menempatkan Indonesia di peringkat ke-50 dari 141 negara, merosot 5 peringkat dari setahun sebelumnya. Khusus untuk infrastruktur, daya saing Indonesia ada di posisi ke-72 dari 141 negara.

Daya tarik infrastruktur di Jawa Tengah membuat tujuh perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan berencana membangun pabrik di kawasan industri Batang, mulai Juli ini.

Dari tujuh perusahaan itu, lima di antaranya dari China, yaitu PT Meiloon Technology Indonesia, PT Sagami Indonesia, PT CDS Asia (Alpan), PT Kenda Rubber Indonesia, PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Adapun dua perusahaan lain adalah PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang dan PT LG Electronics Indonesia dari Korea Selatan.

Investasi tujuh perusahaan

itu 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,9 triliun. Potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 30.000 orang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kawasan industri seluas 4.000 hektar sengaja disiapkan pemerintah untuk menangkap peluang investasi dari relokasi pabrik di China. "Pemerintah menyiapkan kawasan industri dengan harga tanah yang sangat kompetitif. Harga tanah di kawasan industri Batang hanya Rp 1 juta per meter," kata Bahlil dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Bahlil menambahkan, ada 17 perusahaan lain yang berminat merelokasi pabrik dari China, dengan investasi 37 miliar dollar AS dan menyerap 112.000 tenaga kerja. Komitmen investasi sudah terealisasi sekitar 80 persen sehingga lisensi investasi ditargetkan selesai pada akhir 2020.

Kawasan industri Batang juga menawarkan beberapa keunggulan, seperti upah buruh yang relatif rendah, akses ke jalan tol hanya 500 meter, dekat dengan pelabuhan, dan dilintasi jalur kereta api. Pembangunan kawasan industri yang kompetitif diharapkan menarik lebih banyak investor asing ke In-

donesia.

Berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal asing pada Januari-Juni 2020 mencapai Rp 98 triliun.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menuturkan, banyak perusahaan asing mempertimbangkan relokasi bisnis dari China. "Pemerintah cukup responsif menangkap peluang investasi dengan peresmian kawasan industri di Jateng sehingga ada 17 perusahaan yang berminat merelokasi pabriknya," katanya.

Jalan Tol Trans-Sumatera

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur adalah pendanaan.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Panky Tri Febiansyah, Kamis, menyampaikan, sebelum mencari sumber pembiayaan mesti dipahami jenis instrumen pembiayaan yang sesuai dengan iklim bisnis di bidang infrastruktur RI. Selain itu, juga bentuk insentif yang mendukung penerapan instrumen tersebut.

Menurut Panky, infrastruktur fisik bernilai ekonomi bukan hanya ketika dalam tahap

Tujuh Perusahaan yang Akan Relokasi ke Indonesia

1. PT Meiloon Technology Indonesia (relokasi dari Suzhou, China)
2. PT Sagami Indonesia (relokasi dari Shenzhen, China)
3. PT CDS Asia (relokasi dari Xiamen, China)
4. PT Kenda Rubber Indonesia (relokasi dari Shenzhen, China)
5. Denso (relokasi dari Jepang)
6. PT Panasonic Manufacturing Indonesia (relokasi dari China)
7. PT LG Electronics Indonesia (relokasi dari Korea Selatan)

pembangunan, melainkan juga saat sudah jadi dan mulai dimanfaatkan. Karena itu, instrumen mestinya diterbitkan saat manfaat dapat diintegrasikan dengan pengelolaan infrastruktur. Kondisi ini perlu diciptakan agar beban pemberian insentif yang ditanggung pemerintah bisa berkurang. "Sekaligus meningkatkan daya tarik investor swasta terlibat," jelasnya.

Presiden Joko Widodo, Selasa (7/7), memimpin rapat terbatas percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu. Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Waktu tempuh diharapkan lebih efisien dan ada dampak berganda 2-3 kali lipat terhadap PDR. Kebutuhan investasi jalan tol Trans-Sumatera sebesar Rp 476 triliun.

"Dari total investasi itu, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan Rp 386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas *backbone* sampai 2024," kata Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ruas Jalan Tol Trans-Sumatera yang sudah terbangun, tersambung, atau beroperasi sepanjang 393 km. Adapun ruas dalam tahap konstruksi 1.194 km dan dalam persiapan 1.291 km.

Pada triwulan I-2020, perekonomian Indonesia tumbuh 2,97 persen secara tahunan. Sumatera menyumbang 21,4 persen dengan pertumbuhan 3,25 persen. (KRN/CAS)

Judul	Tapera Sokong Program Sejuta Rumah	Tanggal	Jumat, 10 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 7		
Resume	Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan jumlah rumah (backlog) mencapai Rp552,7 triliun.		

| PEMBIAYAAN PROPERTI |

TAPERA SOKONG PROGRAM SEJUTA RUMAH

Bisnis, JAKARTA — Kementerian PUPR meyakini bisa membangun 5 juta unit rumah selama periode 2020-2024 seiring dengan peluncuran program Tabungan Perumahan Rakyat.

Yanita Petriella
yanita.petriella@bisnis.com

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan jumlah rumah (*backlog*) mencapai Rp552,7 triliun.

Dengan itu, dia menyatakan pemerintah akhirnya meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Tapera salah satu solusi ke depan untuk mengatasi masalah *backlog*,” ujarnya dalam RDP Komisi V DPR, Kamis (9/7).

Selama 2020-2024, Khalawi memaparkan APBN yang dialokasikan untuk perumahan hanya Rp54 triliun atau 9,7% dari total kebutuhan dana. Dengan itu, dia memperkirakan hanya bisa membangun 870.000 unit rumah, sedangkan kebutuhannya bisa mencapai di atas jumlah itu. “Ini dibutuhkan tambahan pembiayaan di luar anggaran dari pemerintah untuk menutupi kekurangan lainnya,” ucapnya.

Selama ini, dia menambahkan ada pertumbuhan jumlah keluarga baru setiap tahun sekitar 700.000

Backlog Perumahan di Indonesia Per 2020 (juta unit)

Rumah untuk MBR non fixed income	6,48
Rumah untuk MBR fixed income	1,72
Rumah untuk non-MBR	0,56
Rumah Tidak Layak Huni	2,36

Rencana Strategis Pembangunan Rumah Kementerian PUPR 2020-2024 (unit)

Kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat	3.450.000
Subsidi perumahan FLPP/SSB - SBUM	900.000
BP Tapera	500.000
Subsidi BP2BT	100.000
SMF	50.000

Pencapaian Program Sejuta Rumah Periode 2015-2019



kepala keluarga (KK), yang juga membutuhkan rumah. “Ini jadi dilema karena program sejuta rumah *enggak* cukup mesti ada inovasi lain. Makanya ada Tapera.”

Sepanjang tahun ini, Khalawi menargetkan bisa membangun 330.000 unit rumah sebagai upaya bantuan pembiayaan perumahan pada masa pandemi Covid-19. Jumlah itu terdiri atas alokasi FLPP sebanyak 88.000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 67.000 unit, dan tambahan stimulus fiskal melalui subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 175.000

unit. “Untuk SSB yang sebanyak 175.000 unit ini anggarannya Rp1,5 triliun.”

Selama adaptasi kebiasaan baru, dia menyatakan akan mempercepat pembangunan rumah susun untuk eks-TNI dan Polri guna memberikan pasar juga para pengembang swasta.

Sejauh ini, dia memaparkan ada kendala lahan di kota besar yang dikuasai pengembang kakap sehingga menyulitkan membangun rumah untuk MBR.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tapera

Adi Setianto memproyeksikan peserta Tapera hingga 2024 mencapai 13,1 juta peserta dengan dana kelolaan Rp60 triliun. Khusus untuk pegawai swasta, ada aturan setelah 7 tahun PP diterbitkan baru wajib menjadi peserta Tapera.

Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa meminta BP Tapera memperjelas kewajiban iuran serta alokasi operasionalnya. “Ini karena gaji masyarakat dipotong dan mereka harus dapat sesuai dengan haknya dan juga dirinci sehingga mereka tahu kapan bisa beli rumah,” katanya.

Judul	Proyek Trans Sumatera Ditargetkan Tembus 500 kilometer	Tanggal	Jumat, 10 Juli 2020
Media	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 1		
Resume	Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ditargetkan bisa menembus lebih dari 500 kilometer hingga akhir tahun ini. Senior Executive Vice President Corporate Secretary, PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, mengatakan terdapat 495 kilometer yang akan dinyatakan selesai terbangun dalam beberapa pekan ke depan.		

EKONOMI DAN BISNIS

Proyek Trans Sumatera Ditargetkan Tembus 500 Kilometer

Hutama Karya segera mengajukan tarif dua ruas baru.

EDISI, 10 JULI 2020



JAKARTA – Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ditargetkan bisa menembus lebih dari 500 kilometer hingga akhir tahun ini. Senior Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, mengatakan terdapat 495 kilometer yang akan dinyatakan selesai terbangun dalam beberapa pekan ke depan.

“Tinggal ditambah dua seksi jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang hampir 17 kilometer yang kami kejar sampai akhir tahun,” ucap dia kepada *Tempo*, kemarin.

Hingga kini, perseroan sudah menghubungkan jalur Bakauheni-Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 325 kilometer, ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 kilometer, serta jalur Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer. Manajemen Hutama Karya pun menunggu hasil uji laik fungsi lima seksi jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer untuk memperoleh sertifikat pengoperasian.

Dari seluruh jalur bebas hambatan sepanjang 495 kilometer itu, Fauzan melanjutkan, baru 368 kilometer yang sudah bertarif. “Paket pengujian jalan tol Pekanbaru, ataupun nanti untuk jalan tol Sigli, sudah termasuk pengajuan tarif,” ucapnya. “Dari kajian bisnis kami, kedua ruas mungkin bisa diberi tarif Rp 1.000 per kilometer karena pengoperasiannya saat ini belum ekonomis.”

Perusahaan sedang mengejar sisa target penyelesaian perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Trans Sumatera seiring dengan pulihnya kegiatan saat masa transisi pandemi atau *new normal*. Lima PPJT yang dikejar pada tahun ini adalah jalan tol Betung-Jambi, Jambi-Rengat, Rengat-Pekanbaru, Dumai-Rantau Prapat, serta Rantau Prapat-Kisaran. Hingga Februari lalu, Hutama sudah mengantongi 14 PPJT dari total 24 ruas sepanjang 2.765 kilometer.

Bila mampu menyelesaikan lima target PPJT baru itu, Hutama Karya sudah membidik lima perjanjian di lima ruas lainnya untuk tahun depan dan seterusnya. Menurut Fauzan, target lanjutan perseroan adalah ruas Langsa-Lhokseumawe, Lhokseumawe-Sigli, Prapat-Tarutung-Sibolga, termasuk dua ruas yang terdepak dari daftar proyek strategis nasional (PSN), yakni Palembang-Tanjung Api-api serta Batu Ampar-Muara Kuning-Hang Nadim.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian, mengatakan perencanaan dan konstruksi dua ruas eks PSN itu masih ditunda sementara karena pengembangan kawasan lain di lokasi proyek. “Kita tunda sampai ada kejelasan,” ucap dia.

Executive Vice President (EVP) Divisi Pengembangan Tol PT Hutama Karya, Agung Fajarwanto, mengatakan perusahaannya sudah menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk pengoperasian seksi 4 Indrapuri-Blangbintang pada jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 13,5 kilometer. Meski belum dirincikan, perusahaan mengebut satu seksi lain hingga akhir 2020 ini.

“Kami sudah mulai sosialisasi pengoperasian jalan tol kepada pengguna, mengingat jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Aceh,” tutur Agung. Ia menambahkan, sosialisasi digelar hingga ada keputusan mengenai tarif dari pemerintah.

Gubernur Jambi Fachrori Umar juga berupaya mempercepat pengerjaan ruas Trans Sumatera lain, yaitu Jambi-Rengat, sepanjang 198 kilometer. Setelah penyerahan dokumen rencana pengadaan lahan oleh perwakilan Kementerian PUPR, pengembangan ruas tersebut tinggal menunggu proses penetapan lokasi. “Dilanjutkan pembebasan lahan. Sesegera mungkin dibangun,” ucapnya.

YOHANES PASKALIS

Megaprojek Jalur Sumatera

Megaprojek jalan tol Trans Sumatera dipastikan tetap menjadi target infrastruktur yang diprioritaskan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek yang ditargetkan terhubung pada 2024 itu tak membebani keuangan negara, di tengah derasnya pengeluaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Hingga akhir tahun ini akan ada sekitar 500 kilometer ruas Trans Sumatera yang dirampungkan, dari target total sepanjang sekitar 2.800 kilometer. Berikut ini data ruas yang telah rampung terhubung dan progres terakhir pengembangan jalan tol Trans Sumatera.

Ruas yang Sudah Terhubung

• Total: 495 kilometer

Wilayah Terhubung	Panjang Ruas Jalan Tol (Kilometer)
Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung	325
Palembang – Indralaya	22
Pekanbaru – Dumai	131
Medan – Binjai	17

Progres Ruas (Kilometer)

- Ruas beroperasi: **495**
- Ruas dalam konstruksi: **661**
- Ruas dalam perjanjian kontrak dan belum konstruksi: **319**
- Ruas belum dalam perjanjian kontrak dan belum konstruksi: **1.291**

SUMBER: HUTAMA KARYA | YOHANES PASKALIS | EKO WAHYUDI

Judul	Hutama Karya Cari Pembiayaan Alternatif Jalan Tol Sumatera	Tanggal	Jumat, 10 Juli 2020
Media	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 3		
Resume	PT. Hutama Karya (Persero) Tbk berupaya memperbanyak skema pembiayaan alternatif pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk mengurangi ketergantungan terhadap kas pemerintah. Senior Executive Vice President Corporate Secretary, PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan proyek sepanjang total 2.878 kilometer itu sebagian besar merupakan proyek penugasan yang membutuhkan sokongan penyertaan modal negara (PMN).		

EKONOMI DAN BISNIS

Hutama Karya Cari Pembiayaan Alternatif Jalan Tol Sumatera

Perusahaan akan mempercepat penyelesaian koridor utama lebih dulu.

EDISI: 10 JULI 2020



Pembangunan koridor ruas jalan tol Pematang Siantar (Tol Trans Sumatera) di Jl. Pematang KM 25, Kabupaten Pematangsiantar, Sumatera Utara, 19 Juni 2020. ANTARA/Agung di Fita

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) Tbk berupaya memperbanyak skema pembiayaan alternatif pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk mengurangi ketergantungan terhadap kas pemerintah. Senior Executive Vice President Corporate Secretary PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan, mengatakan proyek sepanjang total 2.878 kilometer itu sebagian besar merupakan proyek penugasan yang membutuhkan sokongan penyertaan modal negara (PMN).

"Tapi, sejauh ini, pendanaannya juga berasal dari sumber non-PMN tunai, seperti sindikasi perbankan, monetisasi aset jalan tol, serta surat utang jangka menengah (*global medium term notes*)," ucap dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Fauzan, bentuk permodalan yang tak membebani keuangan negara itu sudah mencapai Rp 56,51 triliun, sejak masa pembangunan 2015 hingga saat ini. Tanpa merinci lebih jauh, dia mengatakan jumlah itu sudah mencakup pendanaan dari mitra ekuitas dan dukungan dana tunai (*viability gap fund* /VGF) konstruksi untuk beberapa ruas Trans Sumatera sepanjang 80 kilometer.

Pada 2015, 2016, dan 2019, perseroan sudah menerima kucuran PMN hingga Rp 16,1 triliun untuk pengerjaan salah satu proyek strategis nasional tersebut. Setidaknya ada Rp 11,5 triliun dari jumlah tersebut yang dipakai untuk pengerjaan delapan ruas. Anggaran terbesar digunakan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer, yang membutuhkan lebih dari Rp 3 triliun. Tahun ini, Hutama dua kali menerima PMN sebesar total Rp 11 triliun. Sejumlah Rp 3,5 triliun pada tahap pertama PMN dialokasikan untuk penyelesaian sisa ruas Pekanbaru-Dumai serta pengembangan ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung. Adapun PMN sebesar Rp 7,5 triliun pada tahap berikutnya untuk pengerjaan jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim serta jalan tol Pekanbaru-Pangkalan.

"Kami sedang mencari pendanaan lainnya," tutur Fauzan. "Strategi *creative financing* masih terus dibahas dengan regulator."

Dalam rapat terbatas percepatan proyek strategis, Selasa lalu, Presiden Joko Widodo meminta pengeluaran negara untuk Trans Sumatera dihitung lebih cermat. Dia meminta proyek tak melulu disokong melalui anggaran pendapatan dan belanja negara karena pengeluaran pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Adapun kebutuhan investasi untuk penyelesaian 24 ruas proyek tersebut diperkirakan menyentuh Rp 500 triliun. "Saya minta ada terobosan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ekuitas dari PMN," ucapnya.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan entitasnya sedang menggenjot konstruksi ruas Trans Sumatera sepanjang hampir 780 kilometer hingga 2022. Angka itu di luar 336 kilometer yang sudah beroperasi saat ini dan tidak termasuk ruas yang kontraknya masih dipersiapkan. "Kami masih butuh Rp 51 triliun untuk menyelesaikan (ruas) yang sedang dibangun," ucap dia kepada *Tempo*. "Soal sumber dana non-PMN, masih terus kami diskusikan."

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya juga sedang menghitung proyeksi panjang jalan yang bisa dicapai dengan kemampuan kas pemerintah pada masa pandemi ini. "Setidaknya kita siapkan finansial untuk mengejar koridor *backbone* Trans Sumatera, yaitu sekitar 1.974 dari total 2.800 kilometer," ucapnya.

Menurut Endra, pengerjaan sejumlah ruas pun bisa tertolong oleh kontribusi VGF dari perusahaan pelat merah lain, seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk. "Saat mereka mendapat izin membangun beberapa ruas, seperti ruas Semarang-Batang atau jalan tol layang Cikampek, ada perjanjian kontribusi juga untuk beberapa ruas Trans Sumatera."

EGI ADYATAMA | YOHANES PASKALIS

Penugasan yang Membebani Anggaran

Hampir seluruh pengerjaan megaprojek jalan tol Trans Sumatera didanai oleh pendanaan negara. PT Hutama Karya (Persero) Tbk, pemegang porsi terbesar pengerjaan proyek tersebut, sudah merampungkan jalan sepanjang 588 kilometer, mencakup ruas sepanjang total 368 kilometer yang sudah beroperasi penuh. Berikut ini arus penyertaan modal negara (PMN) yang menyokong pekerjaan Hutama selama ini.

Dana PMN Hutama Karya untuk Jalan Tol Trans Sumatera
Total: Rp 27,1 triliun

2015	: Rp 3,6 triliun
2016	: Rp 2 triliun
2017 dan 2018 tanpa PMN	
2019	: Rp 10,5 triliun
2020	: Rp 11,1 triliun (tahap I Rp 3,5 triliun dan tahap II Rp 7,5 triliun)

Pendanaan Non-PMN (Kredit Investasi, Monetisasi Aset Jalan Tol, GMTN, Partner Ekuitas) Rp 56,5 Triliun

PMN Tahun Anggaran 2020 Khusus Program Pemulihan Ekonomi Nasional Masa Pandemi

Perusahaan	Nilai (Triliun Rupiah)	Penggunaan
PT Hutama Karya	7,5	pembangunan jalan tol Trans Sumatera
PT Permodalan PNM Nasional Madani	1,5	Kredit UMKM
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	6	Perjanjian kredit KUR dan UMKM
PT Indonesia Tourism Development Corporation	0,5	Pengembangan kawasan wisata Mandalika

SUMBER: HUTAMA KARYA, KEMENTERIAN BUKAN | WENDY ILORENTIN | YOHANES PASKALIS

Hutama Karya Cari Pembiayaan Alternatif Jalan Tol Sumatera

Judul	Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan di Tengah Pandemi	Tanggal	Jumat, 10 Juli 2020
Media	Media Indonesia, halaman 9		
Resume	Dengan datang mendadak, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuat para pekerja proyek pembangunan Jembatan Sei Alalak, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sempat terperangah.		

Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan di Tengah Pandemi

DENGAN datang mendadak, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membuat para pekerja proyek pembangunan Jembatan Sei Alalak, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sempat terperangah. Namun, mereka bisa tenang kembali karena sang menteri datang untuk menyuntikkan semangat.

"Di masa pandemi ini, tetap patuhi protokol kesehatan dalam bekerja. Jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan," ungkap Basuki.

Ia juga mengajak para pekerja proyek optimistis. "Kita harus bisa bertahan, survive melewati pandemi dengan baik. Tetap melakukan upaya antisipasi dalam kegiatan pekerjaan ini."

Pada kesempatan yang sama, Menteri Basuki memastikan proyek-proyek pembangunan terus berjalan di tengah pandemi. Pemerintah

Progres konstruksi pembangunan Jembatan Sei Alalak sepanjang 850 meter telah mencapai 67%.

mendorong semua proyek lebih mengutamakan penggunaan komponen produksi dalam negeri.

"Jangan terlalu cepat memutuskan untuk mengimpor bahan dari luar jika masih ada produk sendiri walaupun harganya sedikit lebih mahal," tuturnya.

Kepada Menteri, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalsel, Syauqi Kamal, menyatakan progres konstruksi pembangunan Jembatan Sei Alalak sepanjang 850 meter telah mencapai

67%. "Saat ini memasuki tahap pekerjaan bentang utama. Jembatan yang menghubungkan Banjarmasin-Barito Kuala ini ditargetkan kelar 2021."

Proyek infrastruktur tetap berjalan di tengah pandemi. Salah satunya pekerjaan fisik Tol Bengkulu-Sumatra Selatan seksi I sudah tersambung 6,5 kilometer. "Seksi I menghubungkan Kota Bengkulu dengan Lubuk Linggau, Sumatra Selatan. Badan jalan menggunakan beton rigid," kata Humas PT Hutama Karya Chandra Irawan.

Di Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menargetkan proses pembebasan dan pembayaran lahan Tol Yogyakarta-Solo tuntas pada 2021. "Pembangunan fisik dimulai pada 2022. Selama sosialisasi yang sudah dilakukan, secara prinsip tidak ada pihak yang keberatan terhadap pembangunan tol ini." (DY/MY/AT/N-2)